

Perundingan IEU-CEPA Ditargetkan Selesai Akhir 2021

Tanggal : Sabtu , 19 Desember 2020
 Media : Investor Daily
 Halaman : 22
 Wartawan : Sanya Dinda
 Muatan Berita : Netral
 Narasumber : Agus Suparmanto (*Menteri Perdagangan*), Iskandar Panjaitan (*Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan,*)
 Rubrik : Industries, Trade & Services
 Topik : Perjanjian Dagang

Perundingan IEU-CEPA Ditarget Selesai Akhir 2021

Oleh Sanya Dinda

▶ JAKARTA – Perundingan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA) ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021. Hingga kini, perundingan tersebut telah dilaksanakan sebanyak 9 putaran, di mana putaran terakhir dilakukan pada 2-6 Desember 2019 di Brussels, Belgia.

Namun, putaran ke-10 tertunda akibat penyebaran pandemi Covid-19 dan kedua pihak melakukan perundingan intensi secara virtual pada 15-26 Juni 2020. Putaran ke-10 diperkirakan dilaksanakan pada Maret 2021.

"Indonesia berharap kedua pihak bisa mencapai kesepakatan pada akhir tahun depan. Untuk itu kami berharap dukungan penuh Prancis untuk memperlancar proses negosiasi," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto dalam keterangan resmi, Jumat (18/12).

Mendag mengaku, pihaknya telah bertemu dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Daya Tarik Ekonomi, Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis Franck Riester untuk membicarakan upaya penyelesaian perjanjian IEU-CEPA. Dalam pertemuan tersebut, Mendag mengatakan bahwa Prancis dan Uni Eropa merupakan mitra perdagangan dan investasi penting bagi Indonesia.

"Untuk itu, perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa (IEU CEPA) menjadi prioritas untuk diselesaikan," ujar dia.

Di hadapan Mendag Prancis, Agus mengangkat isu akses pasar produk kelapa sawit ke Eropa yang mengalami berbagai tantangan, antara lain kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II, bea anti-subsidi (*countervailing duties*) terhadap biodiesel Indonesia, kampanye negatif, dan pengecualian dari insentif pajak untuk bahan bakar alam yang berlaku di Prancis.

Untuk itu, Agus menyambut baik hasil kesepakatan pembentukan kelompok kerja (*Joint Working Group*) antara Uni Eropa dan beberapa negara Asean guna membahas tantangan pemenuhan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di sektor minyak nabati. Agus juga berharap, pertemuan pertama yang direncanakan berlangsung pada Januari 2021 berlangsung produktif.

"Kami menyambut baik peluncuran kelompok kerja bersama antara EU dan negara-negara Asean terkait untuk mengatasi tantangan yang dihadapi minyak nabati dalam mencapai SDGs. Diharapkan melalui forum ini dicapai pemahaman bersama dan bergerak menuju kerja sama yang konstruktif di masa depan," ungkap Agus.

Pada pertemuan ini, Mendag Prancis menyatakan ketertarikannya akan ekonomi halal global yang tengah berkembang dengan pesat, terutama karena peningkatan populasi muslim yang berdampak terhadap permintaan barang dan jasa halal. Selain itu, permintaan terhadap barang dan jasa halal juga datang tidak hanya dari penduduk muslim.

"Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tujuan untuk menjadi pusat halal global. Indonesia sedang mengembangkan industri halal dalam negeri dan fokus pada penguatan rantai nilai halal. Untuk itu, Indonesia mendorong perusahaan Prancis berinvestasi di sektor halal," jelas Agus.

Menurut Agus, ekonomi halal global terus berkembang dengan peningkatan populasi muslim yang diperkirakan mencapai 2,2 miliar pada 2030. Sementara konsumsi global produk makanan dan minuman halal pada 2018 mencapai US\$ 1,4 triliun dan diperkirakan meningkat menjadi US\$ 2 triliun pada 2024.

Indonesia, kata dia, berupaya menjadi pusat halal dunia dengan mengembangkan industri halal domestik dan penguatan rantai nilai halal. Rantai nilai halal mencakup halal hub daerah, sertifikasi halal, kampanye halal, gaya hidup halal, insentif investasi, dan kerja sama internasional. Indonesia juga berencana mengembangkan sistem ketahanan halal (*traceability system*) dan sistem asuransi halal.

"Kementerian Perdagangan men-



Agus Suparmanto

dukung peningkatan ekspor halal dengan upaya peningkatan daya saing produk halal, dukungan UMKM, relaksasi ekspor dan impor untuk tujuan ekspor, serta penguatan akses pasar melalui promosi dan perjanjian perdagangan," kata Agus.

Indonesia-Chili

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI) Kementerian Perdagangan bersama dengan Undersecretariat of International Economic Affairs Ministry of Foreign Affairs of Chile secara resmi meluncurkan perundingan perdagangan jasa dalam kerangka Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Chili (IC CEPA). Peluncuran perundingan tersebut dilakukan Indonesia dan Chili pada Kamis (17/12).

Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Kemendag Iskandar Panjaitan mengungkapkan, peluncuran yang ditandai dengan publikasi bersama dokumen "Joint Statement on the Launch of Services Trade Negotiation of the IC CEPA" ini, diharapkan dapat

melengkapi persetujuan perdagangan barang dalam kerangka IC CEPA yang sudah berjalan sejak Agustus 2019.

"Kesepakatan hasil perundingan yang saling menguntungkan diharapkan dapat tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Proses persiapan perundingan sebenarnya telah direncanakan sejak akhir 2019, untuk kemudian dapat dimulai pada 2020. Namun, akibat pandemi Covid-19, dilakukan penjadwalan ulang agenda perundingan ini," ujar Iskandar yang akan memimpin Delegasi Indonesia dalam perundingan.

Iskandar melanjutkan, diperkirakan proses perundingan berjalan lancar meski sedikit terhambat. Hal ini mengingat baik Indonesia maupun Chili sudah cukup memiliki banyak pengalaman dalam melakukan perundingan perdagangan jasa dengan tingkat liberalisasi yang relatif tinggi.

Sedangkan dalam hal teknis pelaksanaan perundingan, menurut Iskandar, kedua pihak sepakat adanya fleksibilitas pada opsi pertemuan tatap muka. Komunikasi virtual menjadi salah satu opsi pertemuan sebagaimana telah menjadi praktik normal sejak merebaknya pandemi Covid-19.

Diharapkan, proses perundingan ini dapat melengkapi pencapaian dari persetujuan IC CEPA yang sudah berjalan di bidang perdagangan barang. Pada 2019, Indonesia tercatat mengekspor barang sekitar US\$ 126 juta ke Chili.

"Jika perundingan perdagangan jasa telah dapat diselesaikan, diperkirakan Indonesia dapat memiliki akses pasar baru ke Chili untuk sektor jasa transportasi, jasa keuangan, jasa konstruksi, dan juga jasa profesional. Selain itu, diharapkan persetujuan perdagangan jasa dengan Chili dapat membuka akses pasar jasa Indonesia ke regional Amerika Latin melalui Chili sebagai hub," pungkas Iskandar.